

PERGUMULAN HATI SEORANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
The Hearth Struggle Of Commitment Making Official (CMO)

Oleh:

Harsen Tandi¹⁾, Basri Hasanuddin²⁾, dan Alimuddin³⁾

Email : harsen.tandi@gmail.com

Pascasarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengungkap realitas pergumulan hati seorang pejabat pembuat komitmen yang menyanggupinya bertahan dalam perannya di entitas pemerintahan daerah. Pergumulan hati tersebut merupakan fenomena yang tergali dari kehidupan sosial aparat sipil negara pada sebuah pemerintahan daerah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi dramaturgi yang dikembangkan oleh Erving Goffman. Dramaturgi memetakan fenomena pergumulan hati seorang pejabat pembuat komitmen dengan menunjukkan berlakunya relasi kekuasaan dan pengetahuan ala foucauldian yang membaur di dalamnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat-sifat altruistik dalam diri pejabat pembuat komitmen membuatnya sanggup melakoni perannya di entitas pemerintahan daerah di tengah situasi pergumulan hati yang dialami.

Kata kunci : Pejabat Pembuat Komitmen, Pergumulan Hati, Dramaturgi, Foucauldian, Altruistik

ABSTRACT

This research aims to reveal the reality of the struggle of the heart of a commitment-making official (CMO) who holds it resilient in its role in local government entities. The heart struggle is a phenomenon unearthed from the social life of the state civil apparatus in a local government.

This research is a qualitative research using dramaturgy methodology developed by Erving Goffman. Dramaturgi mapped the phenomenon of the struggle of the heart of a commitment-making official by demonstrating the validity of power relations and foucauldian-style knowledge that blends in it.

The results of this study indicate that the altruistic properties in the official making the commitment make it able to melakoni role in local government entities in the midst of the situation of the struggle of the heart that is experienced.

Keywords : A commitment-making official, A Heart Struggle, Dramaturgy, Foucauldian, Altruistic

A. PENDAHULUAN

Perihal pemenuhan kebutuhan finansial PPK jika dipandang dengan teori motivasi Abraham Maslow merupakan upaya pemenuhan kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam hirarki kebutuhan yang dikenal dengan *Maslow's hierarchy of need theory* (Goble, 1987: 69-72). Pandangan Maslow dengan teori kebutuhannya terhadap

pemenuhan kebutuhan finansial PPK seharusnya merupakan motivasi bagi ibu Diam dalam meraih jabatan PPK dan selanjutnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh kesukaan. Namun berdasarkan ungkapan ibu Diam selaku PPK, menggambarkan paradoks terhadap teori kebutuhan Maslow.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan salah satu pejabat pengelola keuangan di satuan kerja yang peranannya

sangat krusial. Setiap tahapan dalam siklus anggaran (budget cycle) akan selalu dijumpai peran serta dari PPK ini, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena peranannya yang sangat penting tersebut maka PPK diharapkan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik. PPK bahkan dapat menjadi lorong cerah bagi upaya bangsa dalam menapaki pencapaian good governance. (Asliana, 2012).

Menantang untuk dicermati tentang kesetujuan Sofyan Djalil semasa menjabat Menko Perekonomian tahun 2015, bahwa kurangnya serapan anggaran APBND salah satunya disebabkan oleh ketakutan PPK pada jeratan hukum. Pernyataan mantan menko perekonomian ini menegaskan bahwa pemerintah selaku regulator paham betul akan kegundahan PPK yang sarat dengan risiko, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya regulasi untuk membantu PPK agar tidak terjerat hukum. Namun pemerintah sepertinya gagal memahami bahwa penguatan dalam bentuk regulasi tidak serta-merta mampu meredam kegundahan hati penjabat PPK (Noviansyah, 2016).

Akuntansi dengan meniupkan prinsip pengungkapan lengkap dan prinsip penyajian wajar kedalam alam sadar PPK mungkin senada dengan tulisan Kamayanti (2011) bahwa akan menggiring kesepahaman kita pada akuntansiana . Nada provokatif akuntansi ini merupakan upaya memaknai reformasi akuntansi di Indonesia. Toh, PPK merupakan penyelenggara akuntansi yang “apa lacur” sudah menenggelamkan dirinya dalam arus gelombang reformasi akuntansi yang dibawa oleh New Public Management (NPM) ke Indonesia (Damayanti, 2013:2).

Padu-padan pertanggungjawaban dan profesionalisme PPK dalam langgam akuntansi merupakan upaya mencapai penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Pencapaian ini merupakan proses penyadaran betapa indah berkesenian dalam akuntansi jika berkemanfaatan. Penyadaran ini pula menyentuh alam pikir PPK yang terpenjara oleh budaya “asal bapak senang” (Indrananto, 2012). Adagium “Asal Bapak Senang (ABS)” merupakan kesepakatan atas ketidakpuasan masyarakat yang terpendam atas maraknya ketidakadilan ekonomi dan

menanti momentum transformasi luapan ketidakpuasan. Mimpi saya momentum transformasi dalam bentuk penyajian laporan keuangan Pemda yang baik, yang telah berjalan saat ini bisa memperlihatkan seiramanya langgam akuntansi dengan nilai-nilai kebajikan.

Pergumulan hati PPK merupakan fenomena yang secara psikologi dapat dikaitkan dengan kajian psikologi sosial yang dikemukakan oleh Darley dan Latane (1968). Kajian Darley dan Latane yang dikenal sebagai *bystander effect* mengungkapkan bahwa orang-orang sekeliling cenderung tidak menolong korban jika banyak pihak menyaksikan peristiwa yang dialami korban disebabkan saksi akan saling berharap untuk menolong, dan dalam hal ini PPK merupakan korban sedangkan rekan kerja PPK merupakan saksi. PPK akan semakin terpuruk jikalau secara psikologi merasa bahwa sekitarnya mengetahui kondisinya namun tidak dapat memberikan bantuan atas masalah yang dialaminya. Salah satu bagian penting tentang ramainya saksi atas eksistensi PPK yaitu perihal pembentukan aset tetap yang merupakan output kerja PPK.

Teatrikal PPK dalam pertanggung jawaban output kerjanya yang berupaya memberikan kesan positif merupakan cara untuk mengasingkan bahkan membelenggu gejolak pergumulan hatinya. Fenomena PPK dalam riak pelayanan pemerintah daerah dan seruan-seruan moral dari berbagai sumber bisa mengemuka, dan selanjutnya diurai dengan metodologi yang mampu menampilkan kontradiksi PPK didepan khalayak dan PPK disaat tanpa khalayak. Metodologi ini “sebagai pisau bedah”, untuk mengungkap eksistensi PPK beserta kebatinannya.

Paradigma dan lingkungan pemerintah daerah yang telah berubah saat ini, memaksa setiap aparat pemerintah daerah untuk semakin transparan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat masyarakat. Akuntabilitas harus menjadi tolok ukur moralitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan PPK merupakan komponen penting didalam lingkungan pemerintahan ini. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pada Pasal 12 Ayat 2 huruf a berbunyi “Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan memiliki

integritas“. Integritas dapat diartikan sebagai tindakan yang sesuai dengan norma, nilai, dan prinsip yang telah diatur. Integritas juga mengandung aspek kejujuran yang berkorelasi dengan akuntabilitas. Dalam Pengadaan Barang/Jasa integritas merupakan persyaratan pertama yang harus dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perwujudan dari integritas dituangkan dalam Pakta Integritas yang harus ditandatangani oleh PPK.

Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 13 Perpres Nomor 70 Tahun 2012). Kenyataan yang seringkali terjadi, Pakta Integritas hanyalah selembaran kertas yang dijadikan dokumen pelengkap dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan perannya selaku PPK, yang harus/seharunya berintegritas, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah. Upaya PPK untuk tetap pada bingkai “integritas” sesuai amanat peraturan perundungan yang berlaku, harus pula terlibat dalam interaksi dengan orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non verbal. Dalam melakukan interaksi inilah banyak terjadi persinggungan kepentingan yang sangat mungkin menimbulkan konflik. Konflik batiniah dalam bentuk pergumulan hati merupakan konflik dominan yang menjadi tantangan sekaligus permasalahan dalam menjalankan peran PPK. Ibarat Aktor di atas panggung yang melakoni drama dengan Judul Pergumulan Hati Seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka permasalahan penelitian adalah bagaimanakah aktor utama yang berperan sebagai PPK sanggup melakoni perannya dalam pergumulan hati di entitas pemerintahan daerah tempatnya bekerja?

Aktor PPK ini menjalankan perannya di atas panggung kehormatan selaku penjabat PPK sesuai Surat Keputusan (SK) sebagai skenario yang telah disusun bersama aturan-aturan dan arahan untuk dapat tampil dengan sempurna didepan pihak-pihak terkait tugas pokok PPK (Front Stage) yang sangat mungkin tidak sesuai dengan suasana batiniah Aktor PPK ini, dan penelitian ini berupaya untuk menampilkan “Back Stage”

atau panggung belakang berupa cara pandang aktor PPK ini menonton dirinya sendiri.

Terjawabnya permasalahan penelitian ini selanjutnya akan mencapai tujuan penelitian sehingga penelitian ini dapat menyakinkan pembaca bahwa penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengungkap realitas yang mendorong seorang PPK sanggup bertahan melakoni perannya dalam pergumulan hati di entitas pemerintahan daerah tempatnya bekerja.

B. METODE PENELITIAN

1. Setting Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten “Pattalassang”. Nama kabupaten ini merupakan nama samaran atas permintaan informan dengan pertimbangan keamanan dan penghindaran dari rasa ketidaknyamanan yang dirasakan informan. Pilihan nama Pattalassang untuk kenyamanan saya sebagai peneliti. Pattalassang merupakan kecamatan di kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan dimana saya berdomisili dan akan menghabiskan sebagian besar waktu untuk merenung dan menyatakan serpihan sumber penelitian agar menjadi utuh dan layak disebut Tesis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dibangun dari pengumpulan data yang melibatkan saya sebagai peneliti dengan subjek penelitian melalui observasi (participant-observation), dokumentasi dan wawancara. Melalui metode observasi saya akan mampu mengadaptasi perspektif subjek penelitian sehingga tidak terkesan hanya sekedar mengamati saja.

3. Teknik Analisis Data

Pelabelan aktor untuk setiap pihak yang terlibat langsung dengan tampilan penelitian ini merupakan hasil metafora drama bagi setting sosial objek penelitian. Tindakan para aktor, baik pada aktor utama maupun aktor pendukung dimaknai sebagai sebuah hasil dari citra diri yang diupayakan oleh tiap individu, baik saat tampil sendiri maupun secara berkelompok (tim). Metafora drama merupakan setting sosial PPK yang menunjukkan bekerjanya pendekatan dramaturgi Goffman sebagai pilihan metodologi penelitian.

Pendekatan Foucault bekerja pada saat peneliti melakukan analisis terhadap panggung depan (frontstage) PPK dimana kekuasaan dan pengetahuan mulai hadir saat surat ketetapan(SK) tugas telah terbit. Analisis terhadap panggung belakang (backstage) untuk menggali makna atas penerimaan ibu Diam terhadap penerbitan SK tugasnya dimana relasi kekuasaan dan pengetahuan juga hadir disitu (backstage). Wawancara terhadap actor pendukung akan sangat membantu analisis relasi kekuasaan dan pengetahuan ala Foucault ini.

C. HASIL

Pertahanan diri ibu Diam melalui pemaknaan hasil penelitian dalam bentuk interview menunjukkan bahwa keteguhan hati dan keimanan merupakan dua hal yang menjadi pertahanan ibu Diam untuk bertahan dalam menanggapi stigma buruk sebagai pelaku penyelewengan keuangan negara dan pengaruh buruk oknum pejabat pemerintahan dalam gelaran tugas dan fungsinya sebagai seorang PPK.

Keteguhan hati ibu diam bersumber dari interaksi sosial dalam keluarga. Begitu besarnya efek keluarga ibu Diam dalam pembentukan keteguhan hatinya. Keteguhan hati yang dalam operasionalisasinya dalam kehidupan profesional memberi efek lanjutan berupa upaya terus menerus menghasilkan karya tanpa memberikan ruang bagi stigma buruk dan perilaku koruptif oknum pejabat pemerintah untuk menggagalkan upayanya. Karya tersebut berbentuk fisik konstruksi, fisik lainnya maupun administrasi yang baik dan wajar, yang tentunya menggunakan kaidah-kaidah akuntansi dalam pengukuran standar baik dan wajar sebagai pengukuran yang berlaku umum di pemerintahan.

Selain keteguhan hati, Keimanan serta rasa syukur sebagai landasan operasional dalam mekanisme pertahanan diri sebagai cara hidup ibu Diam dalam menghadapi pergumulan hatinya. Ibu Diam menerangkan bahwa bersyukur merupakan operasionalisasi keimanan sebagai respon menghadapi Stigma buruk sebagai pelaku penyelewengan keuangan negara dan pengaruh buruk oknum pejabat pemerintahan dalam gelaran tugas dan fungsinya sebagai seorang PPK.

Ditilik dari makna keteguhan hati dan keimanan ibu Diam serta konteks pelayanan publik pemerintahan, maka terbangun nilai yang sama antara ibu Diam dan entitas pemerintahan dimana ibu Diam mengabdi secara profesional. Keteguhan hati dalam menjalankan tugas secara profesional dengan sikap bersyukur menurut dasar keimanan atas semua kenikmatan yang didapatkan diatas panggung PPK merupakan faktor utama yang menciptakan kekuatan dalam sistem pertahanan diri ibu Diam. Kekuatan ini selanjutnya merupakan faktor yang paling bertanggungjawab atas kesanggupan ibu Diam untuk bertahan dalam pergumulan hati yang disebabkan Stigma buruk yang diterima sebagai pelaku penyelewengan keuangan negara dan pengaruh buruk/intervensi oknum pejabat pemerintahan dalam gelaran tugas dan fungsinya sebagai seorang PPK..

D. PEMBAHASAN

Penampilan ibu Diam pada panggung depan (frontstage) yang merupakan rutinitas keseharian, mencitrakan sosok yang tegar dan sangat menikmati pekerjaannya tanpa beban, termasuk pandangan khalayak (penonton) tentang hamparan kenikmatan yang dirasakannya. Hamparan kenikmatan yang ditawarkan jabatan PPK inilah yang menjadi stigma yang harus ditanggung ibu Diam.

Saya pun bahkan, menurut penggalian makna klausa ibu Diam, telah masuk sebagai pelaku pemberi stigma buruk bagi pemeran PPK tentang berterima umumnya pemeran PPK sebagai penerima imbalan jasa dari pihak pelaksana proyek, sebab begitulah yang digambarkannya. Vonis ibu Diam terhadap saya memberikan makna ganda, pertama, menyiratkan pesan bahwa stigma buruk telah menjadi bagian dirinya selaku pemeran PPK. Kedua, memberikan pesan bahwa ibu Diam berupaya untuk memberikan kesan sebaliknya, dengan harapan akan tergambar citra ibu Diam bukan termasuk strata penerima jasa dari pihak pelaksana proyek.

Kajian psikologi dengan perspektif model ancaman identitas yang dikembangkan Major dan O'Brien (2004) membantu memberikan gambaran tentang cara ibu Diam menanggapi bentuk stigma yang melekat padanya. Model ancaman identitas Major dan O'Brien menerangkan bahwa individu atau

kelompok sosial yang menjadi target stigma berpeluang untuk melawan stigma melalui dua cara, yaitu cara vokasional dan nonvokasional. Cara vokasional adalah cara yang melibatkan usaha untuk menyelesaikan, sedangkan cara nonvokasional adalah cara tidak melibatkan usaha untuk menyelesaikan termasuk didalamnya adalah menyembunyikan status yang mendatangkan stigma atau menghindar dari situasi yang mendatangkan stigma. Model Major dan O'Brien ini jika dibingkai dengan situasional ibu Diam melalui pernyataan "Pasti kita' kira saya bangun rumah dari kontraktor..." menunjukkan ibu Diam memilih cara vokasional. Lontaran klausa untuk membuka ruang bahasan jelas menunjukkan bahwa ibu Diam tidak berupaya untuk menutup kontroversi stigmatisasi dan sekaligus siap berargumentasi perihal stigma aktor PPK.

Kenikmatan lain yang disebutkan oleh ibu Diam yang ditawarkan bagi pemerintahan jabatan PPK adalah bentuk komunikasi dengan pejabat-pejabat penting dan rekanan kerja di lingkungan kerja ibu Diam. Komunikasi yang terjalin secara profesional dalam pandangan ibu Diam merupakan hal yang baik. Foucault (1980) dalam karyanya power and knowledge dapat menegaskan konteks tutur Ibu Diam tentang relasinya dengan para oknum pejabat pemerintahan dalam konteks relasi kekuasaan dan pengetahuan. Penegasan bahwa penguasa selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Pandangan Foucault (1980) tentang konsep kekuasaan dan pengetahuan menawarkan cara pandang perihal relasi yang terbangun antara Ibu Diam selaku PPK dengan para pejabat pemerintahan dalam konteks relasi komunikasi. Nampak bahwa kekuasaan para oknum pejabat yang disinyalir ibu Diam tidak hanya dimiliki secara pasif namun juga secara aktif dipraktikkan. Praktik kekuasaan ini berada dalam suatu ruang lingkup dimana terdapat aktor lain seperti atasan ibu Diam dan bendahara. Ruang dimana ibu diam, para oknum pejabat dan aktor lainnya memiliki relasi yang terhubung satu dengan lainnya. Kekuasaan yang dipraktikkan tersebut terartikulasikan lewat pengetahuan, contohnya pengetahuan para oknum pejabat untuk memanipulasi kewenangan dengan dalih "komunikasi" dan bertameng "aturan

perundangan". Pengetahuan oknum pejabat inilah yang kemudian menimbulkan efek penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi komunikasi diatas panggung PPK.

Pengalaman ibu Diam tentang pengaruh oknum pejabat dalam proses dan mekanisme kerja yang melahirkan dua frasa "setengah mati" dan "pertanggungjawabkan" secara fenomenologis sangat dekat dengan deskripsi Ramli (2014) tentang PPK dalam tajuk "Jadi PPK harus Sakti Mandraguna". Kesaktian nampaknya memang dibutuhkan untuk meruntuhkan perasaan yang begitu menghantui Ibu Diam dalam kesalahan penyusunan pertanggung jawaban administratif. Cela kesalahan sekecil apapun akan dipergunakan sebagai pintu masuk bagi aparat pemeriksa dan hukum untuk melakukan penindakan. Berlapisnya aparat pemeriksa dan hukum baik internal maupun eksternal seperti inspektorat, kejaksaan, BPK bahkan KPK yang merupakan mimpi buruk bagi pelaku pelanggar penggunaan keuangan negara.

Habitat proyek pemerintah sebagai habitat ibu Diam yang penuh rintangan jeratan hukum dan tuntutan performance yang tinggi menuntut Ibu Diam untuk dapat hidup seakan sosok setengah dewa. Metafora setengah dewa ini sebagai perlambang sosok PPK yang mampu menggapai harapan terpenuhinya integritas, tanggung jawab serta kompetensi yang amanatkan perundangan dengan rintangan yang terbentang dalam bentuk intervensi kuat oknum pejabat pemerintah yang koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Goble, F. G. 1987. *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*. Kanisius. Bandung.
- Hurlock, E.B. 2006. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Edisi Kelima. (alih bahasa: Istiwidayanti dan Soedjarwo). Jakarta: Erlangga.
- Hawari, D., 2001. *Stres, Cemas dan Depresi*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, ISBN 979-496-248-1
- Kamayanti, A. 2011. *Akuntansi atau Akuntansiana? Memaknai Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*,

- Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol 2 No.3. Desember 2011 ISSN 2086-7603
- Major, B. dan O'Brien, L.T. 2005. *The Social Psychology of Stigma*. Annual Review of Psychology, 56, 393-421.
- Myers, D.G. 2000. Social Psychology. Boston : McGraw-Hill College.
- Noviansyah, A., 2016. Gara-garanya kerap terjadi kriminalisasi jika terjadi kesalahan administrasi yang berujung pada masalah hukum.", TEMPO.CO, Edisi Kamis 3 Maret 2016,
- Ramli, S. 2014. *Jadi PPK harus Sakti Mandraguna*. Blog pribadi. <http://samsulramli.com/jadi-ppk-harus-setengah-dewa/>, diakses 30 September 2017
https://m.tempo.co/read/news/2015/07/31/090_687976/perpres-daninpres-percepatan-pembangunan-segera-terbit, diakses 3 Maret 2016)